INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Urusan Bidang : Keuangan
3. Tugas : Membantu Gubemur dalam menye1enggarakan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
4. Fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset.
   b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset.
   c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya.
   d Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tujuan : - Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah predikat tertinggi yang diberikan kepada laporan keuangan yang menyajikan informasi keuangan secara wajar dan material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tanpa ada masalah signifikan yang perlu dikecualikan. *Sumber : BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia).*	Kriteria opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menurut BPK RI adalah : 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Laporan keuangan harus sesuai dengan SAP yang berlaku, yang berarti disajikan secara wajar dan memadai sesuai aturan akuntansi yang ditetapkan. 2. Kecukupan Pengungkapan Informasi keuangan dalam laporan harus diungkapkan secara cukup dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dibuat. 3. Sistem Pengendalian Internal Memadai. Entitas yang diperiksa harus memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dan memadai untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan. 4. Tidak Ada Salah Saji Material Tidak terdapat kesalahan atau kekurangan yang material dalam laporan keuangan. Jika ada, dampaknya tidak signifikan dan tidak memengaruhi kewajaran laporan secara keseluruhan.	Laporan Keuangan	BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
2.	Sasaran : - Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	- Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan	%	APBD disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan *(Pedoman Penyusunan APBD)*	$\frac{\text{Dokumen APBD Perubahan Tahun n Tepat Waktu} + \text{Dokumen APBD Induk Tahun n Tepat Waktu}}{\text{2 Dokumen}} \times 100\%$	Dokumen APBD Tahun n dan Dokumen APBD Tahun n+1	BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		- Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (*Budget Execution*)	%	Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal *(Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)*	$\left[\left\{\frac{\text{Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi}}{\text{Total belanja APBD}}\right\}-1\right] x100\%$	Dokumen yang memuat rincian realisasi belanja dalam APBD (sesuai laporan realisasi anggaran) dan dokumen yang memuat rincian total belanja dalam APBD sebelum perubahan	BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
	- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Indeks Pengelolaan Aset	%	Mengukur kualitas tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) melalui Indeks Pengelolaan Aset	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang akuntabel dan Produktif **ST. 1.2 = NP.1.1.2 + NP.1.2.2** 2. Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan **ST.2.2 = NP.2.3.2 + NP.2.4.2 + NP.2.5.2** 3. Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif **ST.3.2 = NP.3.6.2 + NP.3.7.2** 4. Administrasi BMD yang Andal **ST.4.2 = NP.4.8.2**	SIPD BMD dan Laporan OPD	BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

Palembang, 15 Oktober 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

H. YOSSI HERVANDI,S.E., M.M., CGAA
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 198208162001121004